



Dindik Kaji Sumbangan Wali Murid

YOGYAKARTA (SINDO) – Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Yogyakarta saat ini tengah mengkaji persoalan teknis terkait sumbangan orangtua siswa bagi proses pendidikan. Ini dilakukan karena akhir-akhir ini ada desakan dari segelintir masyarakat agar sekolah tidak gratis 100%. "Kami akan mengkaji secara serius terkait wacana yang muncul seputar sumbangan orangtua untuk membantu proses belajar mengajar siswa," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Samsury saat dihubungi SINDO kemarin.

Ia mengatakan, saat ini ada sebagian orangtua siswa yang justru mengeluhkan pendidikan 100% gratis. Ini dipicu kekhawatiran adanya dampak buruk terhadap mutu pendidikan nantinya. Lantaran adanya dana kucuran pemerintah berupa BOS dan Bosda, sekolah sudah tak bisa menarik dan dalam bentuk apapun terhadap orangtua murid.

Ia mengatakan, sangat menyayangkan jika ada orangtua yang hendak memberi-

kan bantuan terhadap sekolah namun di tolak karena adanya peraturan yang menyebutkan sekolah tak boleh menarik sumbangan. Menurutnya sah-sah saja jika orangtua akan memberikan bantuannya secara sukarela.

"Kami sangat berhati-hati dalam mengkaji konsepnya. Kami tidak mau nantinya justru berbenturan dengan peraturan yang ada, bahkan terjadi salah arti di mata masyarakat," katanya.

Dengan kata lain, ia menjelaskan, meski baru sebatas konsep ia berharap jika nantinya benar-benar muncul peraturan, garis merahnya adalah orangtua boleh menyumbang bantuan terhadap sekolah, namun sekolah tak diperbolehkan menentukan besaran jumlah sumbangan tersebut. Selain itu yang cukup penting adalah pengelolaannya juga tidak dilakukan oleh pihak sekolah melainkan murni oleh orangtua siswa itu sendiri. "Sebagai gambaran saja, sekolah tak boleh menentukan jumlah sumbangan, sekolah juga tak boleh mengelola uang hasil ter-

sebut," terangnya.

Terkait adanya sekolah gratis, ia juga menyebutkan adanya kekhawatiran jika ke depannya banyak orangtua yang akan menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri, karena ada ketakutan sekolah gratis yang akan mengabaikan mutu pendidikan.

"Saya ada gambaran, tidak menutup kemungkinan lama-lama siswa kita banyak yang disekolahkan di luar negeri karena mengejar mutu, dan takut dengan mutu pendidikan di negeri ini yang serba gratis," tandasnya.

Belum lama ini, pengamat pendidikan di Yogyakarta Rochmat Wahab kepada SINDO mengatakan, dana BOS meski sudah ditambah dengan Bosda ia nilai masih kurang untuk mencapai nilai standar mutu pendidikan tertentu. Dengan kondisi semacam itu, ia mengakui sebuah kewajiban jika ada sekolah yang menerima BOS dan menginginkan mutu pendidikan sekolahnya di atas rata-rata melakukan pungutan terhadap orangtua siswa.

(nugroho purbohandoyo)

Wakil kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pendidikan			

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005